



## Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



# Perkembangan Penelitian *Anti-corruption Disclosure* di Indonesia

Sevira Khairatun Hisan <sup>a,1,\*</sup>, Doddy Setiawan <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>1</sup> [sevirakhairatun@student.uns.ac.id](mailto:sevirakhairatun@student.uns.ac.id) \*, <sup>2</sup> [doddy.setiawan@staff.uns.ac.id](mailto:doddy.setiawan@staff.uns.ac.id)

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 13 January 2025

Revised : 22 June 2025

Accepted : 12 August 2025

#### Keywords

Anti-corruption Disclosure

Literature Review

Charting the Field

Research Trend

#### Kata Kunci

Pengungkapan Antikorupsi

Studi Literatur

Charting the Field

Tren Penelitian

### ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the development of anti-corruption disclosure research in Indonesia published in SINTA 2, SINTA 3, and international journals. This research uses the Charting the Field method. The sample amounted to 23 articles that discussed anti-corruption disclosure in Indonesia from 2014-2024. Mapping was done by classifying articles based on population, sample, year of observation, topic, and method. This study shows that anti-corruption disclosure research articles in Indonesia are dominated by the private sector population. The sample varies from an entity to 2,438 observations with 2 - 3 years of observation. Most articles examine antecedent topics with variables of government ownership, company size, foreign ownership, and industry type, also index measurement topics. Articles are dominated by quantitative methods.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perkembangan penelitian *anti-corruption disclosure* di Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Penelitian ini menggunakan metode *Charting the Field*. Sampel penelitian ini berjumlah 23 artikel yang membahas tentang *anti-corruption disclosure* di Indonesia dari tahun 2014-2024. Pemetaan dilakukan dengan mengklasifikasikan artikel berdasarkan populasi, sampel, tahun pengamatan, topik, dan metodenya. Penelitian ini menunjukkan bahwa artikel penelitian *anti-corruption disclosure* di Indonesia didominasi oleh populasi sektor privat, terutama perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di BEI. Sampel bervariasi mulai dari 1 instansi hingga 2.438 observasi dengan 2 – 3 tahun pengamatan. Sebagian besar artikel meneliti topik anteseden dengan variabel kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tipe industri, serta topik pengukuran indeks. Artikel didominasi dengan metode kuantitatif.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

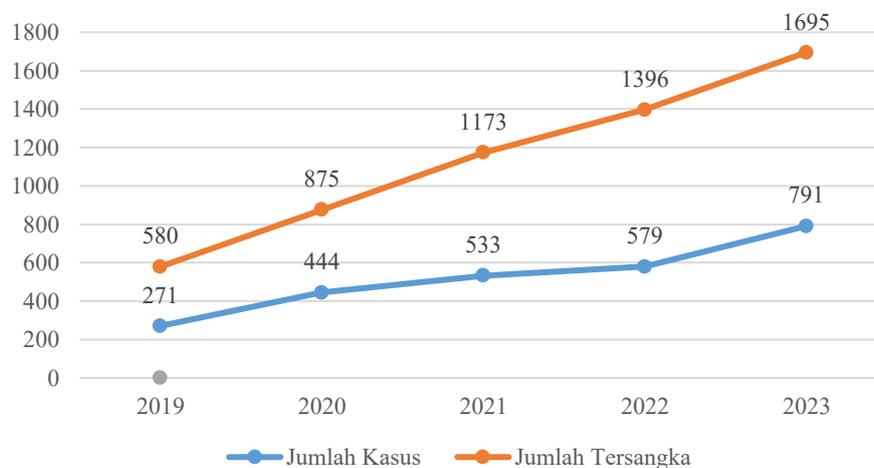


## 1. Pendahuluan

Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan untuk mengatasi korupsi, hasilnya masih jauh dari ekspektasi (Hananti dkk., 2023). Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih memprihatinkan, di mana Indonesia sering kali berada di peringkat bawah, yaitu 115 dari 180 negara dengan skor 34 di tahun 2023 (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2024). IPK yang rendah ini menunjukkan bahwa publik dan pelaku bisnis masih melihat korupsi sebagai masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pun meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch melaporkan tren jumlah kasus dan pelaku korupsi di Indonesia yang konsisten meningkat dari 2019 – 2023 dalam Gambar 1 (Anandya & Ramdhana, 2024). Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, hingga perusahaan besar penggerak perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk memberantas korupsi demi menciptakan tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang bersih dan transparan.

Dalam sektor publik, pengungkapan antikorupsi diatur dalam salah satu peraturan utama, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam administrasi negara. Di sisi lain, telah ditetapkan standar bagi sektor swasta dalam upaya antikorupsi. Standar pengungkapan antikorupsi di perusahaan sektor swasta sering kali mengacu pada ISO 37001:2016. Standar internasional ini dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mencegah, dan menangani korupsi. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana membangun dan memelihara sistem manajemen antikorupsi yang efektif. Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi dalam laporan tahunan. Hal ini menjadi langkah yang mendasari pentingnya entitas, baik sektor publik maupun swasta, dalam mengungkapkan kebijakan dan upaya antikorupsi mereka.

Keterkaitan antara regulasi dan implementasi pengungkapan antikorupsi di Indonesia dapat dilihat dari regulasi dan penelitian yang sudah ada. Pemerintah melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ikut mengatur praktik dan pelaporan CSR, tetapi belum secara spesifik menyebut aspek keberlanjutan mana yang wajib dijalankan dan dilaporkan (Pemerintah Indonesia, 2007). Hal itu membuat pengungkapan antikorupsi di Indonesia masih bersifat sukarela. Praktik yang bersifat sukarela ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Susanti dkk. (2018). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa akibat masih bersifat sukarela, mayoritas perusahaan tidak melakukan upaya pelaporan. Upaya program antikorupsi korporasi di Indonesia pun tergolong rendah.



Gambar 1. Tren Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi di Indonesia

Topik pengungkapan antikorupsi mulai menarik perhatian peneliti. Meskipun belum banyak dilakukan, penelitian yang telah dilakukan tergolong baru dalam hal waktu pelaksanaannya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh [Hartomo & Silvia \(2019\)](#) yang meneliti anteseden pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh [Tyas & Rahmawati \(2023\)](#) yang berupaya melihat apakah karakteristik perusahaan dan tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Selain dianalisis faktor yang mendasari pengungkapannya, kebijakan antikorupsi juga mulai diteliti pengaruhnya terhadap variabel lain. Misalnya, penelitian oleh [Khasanah & Kusuma \(2020\)](#) yang mencoba meneliti pengaruh pengungkapan antikorupsi terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan.

Secara global, penelitian mengenai pengungkapan antikorupsi menjadi menarik baru-baru ini. Misalnya, penelitian [Joseph dkk. \(2016\)](#) yang membandingkan praktik pengungkapan antikorupsi di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini rupanya menjadi acuan bagi banyak penelitian lain yang lebih baru. Penelitian dari [Faisal dkk. \(2022\)](#) misalnya, sebagai penelitian dalam jurnal internasional yang berupaya meneliti faktor yang memengaruhi pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Lebih luas, banyak penelitian lain yang meneliti topik serupa dalam konteks negara lain. Namun, saat ini belum ada penelitian lain yang melakukan *bibliographic review* terhadap pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan penelitian pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan rangkuman dan mengidentifikasi tren terkini mengenai penelitian tentang pengungkapan antikorupsi. Dengan merangkum temuan dari studi sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti dalam pengembangan penelitian dengan topik serupa dan mengeksplorasi aspek yang belum banyak dikaji di masa mendatang.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1. Anti-Corruption

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ([Transparency International](#)). Menurut [Pusat Edukasi Antikorupsi \(2023\)](#), korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang melanggar hukum, norma, dan moral untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan dapat terjadi di lembaga pemerintah dan swasta. [UU No. 20 Tahun 2001](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu negara kerugian finansial, penyuapan, penggelapan di kantor, pemerasan, tindakan penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan kepuasan. Kemudian, muncul praktik antikorupsi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pembuat peraturan untuk mengurangi tingkat korupsi. Perusahaan pun dapat turut serta mewujudkan praktik antikorupsi melalui pelaporan kegiatan antikorupsi. Itu menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta pengakuan konsekuensi negatif terhadap reputasi, integritas, dan legitimasi perusahaan apabila terlibat korupsi ([ACCA, 2008](#)). Pengungkapan memiliki dampak positif berupa peningkatan transparansi yang berdampak pada nama baik perusahaan atas isu korupsi yang berkembang di perusahaan ([Krishnamurti, Shams, & Velayutham, 2018](#)).

### 2.2. Anti-Corruption Disclosure

Pengungkapan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela sebagai komitmen perusahaan dan tindakan nyata dalam upaya melawan tindakan korupsi ([United Nations Global Compact, 2015](#)). Pengungkapan antikorupsi yang termasuk dalam pengungkapan terkait sosial, etika, lingkungan, dan keberlanjutan kini menjadi cara perusahaan dalam mewujudkan akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan ([Murwaningsari, 2009](#)). Dampaknya, perusahaan terbantu dalam mendapatkan atensi dan legitimasi dari para pemangku kepentingan melalui adanya komunikasi kebijakan dan strategi antikorupsi yang dimiliki ([Sari dkk., 2021](#)). Kini, isu korupsi menjadi perhatian khusus dalam aspek sosial perusahaan. Isu korupsi sangat mungkin menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan didorong untuk menerapkan strategi dalam memerangi kegiatan antikorupsi.

Pengungkapan antikorupsi dalam lingkup internasional dan nasional memiliki perbedaan regulasi. Misalnya, Uni Eropa dengan undang-undang EU *Corporate Sustainability Directive* (CSRD) yang mengacu pada *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) untuk pengungkapan upaya antikorupsi ([European Commission](#)). Kemudian, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan *OECD Anti-bribery Convention & Collective Action* yang wajib dijalankan oleh negara anggotanya (OECD). Sedangkan di Indonesia, regulasi yang ada belum bersifat mewajibkan. Misalnya, Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diterbitkan OJK merekomendasikan perusahaan terbuka untuk melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi dalam laporan tahunan ([Otoritas Jasa Keuangan, 2015](#)). Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ikut mengatur praktik dan pelaporan CSR, tetapi belum secara spesifik menyebut aspek keberlanjutan mana yang wajib dijalankan dan dilaporkan ([Pemerintah Indonesia, 2007](#)). Hal itu membuat pengungkapan antikorupsi di Indonesia masih bersifat sukarela.

### 3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan *Charting the Field* yang dikembangkan oleh [Hesford dkk. \(2006\)](#) sebagaimana dalam [Almaeda dkk. \(2023\)](#) sebagai metode dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data sekunder meliputi artikel-artikel pada jurnal nasional yang terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan artikel-artikel pada jurnal internasional. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan artikel yang membahas *anti-corruption disclosure* di Indonesia untuk kemudian diidentifikasi populasi, sampel, tahun pengamatan, hingga diklasifikasikan topik dan metodenya.

Artikel-artikel pada jurnal nasional peneliti akses melalui laman <https://sinta.kemdikbud.go.id/>. Peneliti menggunakan jurnal nasional yang terindeks SINTA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan akreditasi SINTA 2 dan SINTA 3. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan kata kunci “Akuntansi”, “Accounting”, “Manajemen”, “Management”, “Bisnis”, “Business”, “Ekonomi”, “Economy”, “Fraud”, “Keuangan”, dan “Finance”, serta menambah satu jurnal yaitu jurnal “Integritas: Jurnal Antikorupsi” karena relevansi topik. Selanjutnya, peneliti membuka laman jurnal yang ditemukan dan mencari artikel dengan kata kunci “anti-corruption”, “anti-bribery”, “antikorupsi”, “gri 205”, “disclosure”, dan “pengungkapan”. Peneliti kemudian mengunduh artikel yang sesuai dengan topik *anti-corruption disclosure*.

Artikel-artikel pada jurnal internasional peneliti akses melalui database Scopus, SpringerNature, ScienceDirect, dan Emerald Publishing. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan kata kunci “anti-corruption disclosure Indonesia”. Penambahan kata kunci Indonesia untuk menyaring penelitian yang mencakup entitas di Indonesia sebagai sampel, mengingat pencarian dilakukan di *database* jurnal internasional. Peneliti kemudian mengunduh artikel yang sesuai dengan kata kunci. Dengan seluruh artikel yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan tabulasi artikel yang memuat informasi nama jurnal, judul artikel, nama penulis, tahun terbit, variabel, populasi dan sampel, metode, dan hasil penelitian. Peneliti juga memisahkan klasifikasi antara artikel di jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional karena adanya perbedaan standar yang diterapkan pada artikel yang terbit di ketiga kategori jurnal tersebut.

Jurnal yang ditemukan berjumlah 208, dengan rincian 89 jurnal terakreditasi SINTA 2, 109 jurnal terakreditasi SINTA 3, dan 10 jurnal internasional. Berdasarkan pencarian pada jurnal tersebut, peneliti menemukan 23 artikel dengan rincian 7 artikel dari jurnal terakreditasi SINTA 2, 7 artikel dari jurnal terakreditasi SINTA 3, dan 9 artikel dari jurnal internasional. Artikel yang telah ditemukan kemudian menjadi sampel yang akan diklasifikasikan dalam penelitian ini berdasarkan populasi, sampel, tahun pengamatan, hingga diklasifikasikan topik dan metodenya.

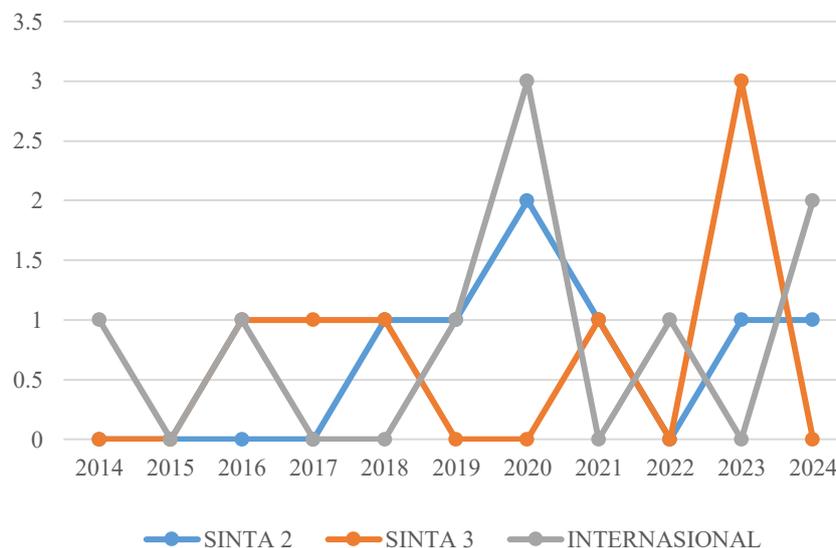
### 4. Hasil dan Pembahasan

Peneliti mengamati perkembangan penelitian *anti-corruption disclosure* yang dilakukan dalam rentang tahun 2014 sampai dengan 2024 (11 tahun). Rentang yang luas dipilih untuk memungkinkan

identifikasi tren dan perubahan pola penelitian dari waktu ke waktu. Hal itu termasuk adanya perilsan regulasi terkait pada tahun 2015 oleh OJK, Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mungkin berdampak pada pola penelitian. Dari jumlah penelitian yang ada di rentang tersebut, topik pengungkapan antikorupsi dapat dikatakan masih jarang dilakukan. Keseluruhan penelitian yang terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional hanya berjumlah 23 artikel dari 21 jurnal. Artikel-artikel tersebut dapat dirinci: 7 artikel dari 7 jurnal terindeks SINTA 2, 7 artikel dari 6 jurnal terindeks SINTA 3, dan 9 artikel dari 8 jurnal internasional.

**Gambar 2** menunjukkan bahwa tren penelitian *anti-corruption disclosure* di Indonesia mulai meningkat pada tahun 2020. Sebelumnya, hanya ditemukan 1 hingga 2 penelitian per tahunnya, bahkan tidak terdapat penelitian dipublikasikan di tahun 2015. Jumlah tertinggi ditemukan pada tahun 2020 dengan 5 penelitian: 2 artikel SINTA 2 dan 3 artikel jurnal internasional. Namun, jumlah penelitian sempat mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya dengan hanya terdapat masing-masing 1 penelitian. Tren kembali meingkat di tahun 2023 dengan 4 penelitian: 1 artikel SINTA 2 dan 3 artikel SINTA 3. Kemudian, sedikit menurun di tahun 2024 dengan 3 penelitian: 1 artikel SINTA 2 dan 2 artikel jurnal internasional.

**Tabel 1** menunjukkan bahwa terdapat 7 artikel dari 7 jurnal terakreditasi SINTA 2 yang membahas *anti-corruption disclosure*. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari ketujuh artikel tersebut yaitu 40 kali dengan rata-rata 6 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan bahwa artikel oleh [Susanti dkk. \(2018\)](#) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 16 sitasi. Artikel ini membahas tinjauan literatur mengenai kebijakan antikorupsi korporasi, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bagi korporasi, dan meningkatkan efektivitas program antikorupsi, termasuk di dalamnya praktik pengungkapan antikorupsi. Selanjutnya, jumlah sampel dari ketujuh artikel tersebut yaitu 4.894 observasi dengan rata-rata 699 observasi. Sampel terbanyak yaitu penelitian yang dilakukan oleh [Hartomo & Silvia \(2019\)](#) dengan 2.438 observasi pada perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Kemudian, tahun pengamatan dari ketujuh artikel tersebut berkisar dari 1 hingga 5 tahun dengan rata-rata 3 tahun. Tahun pengamatan terlama, 5 tahun, yaitu penelitian yang dilakukan oleh [Hartomo & Silvia \(2019\)](#) dan [Hartomo & Hutomo \(2020\)](#).



**Gambar 2.** Tren Penelitian *Anti-Corruption Disclosure* di Indonesia

**Tabel 1.** Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel SINTA 2

Jurnal	Artikel	Jumlah Sitasi	Jumlah Sampel	Tahun Pengamatan	
				Rentang	Jumlah
JAKI	(Khasanah & Kusuma, 2020)	11	207	2016-2018	3
JKA	(Hartomo & Silvia, 2019)	8	2438	2013-2017	5
ASSETS	(Hartomo & Hutomo, 2020)	5	1864	2013-2017	5
MRAAI	(Tyas & Rahmawati, 2023)	0	170	2019-2020	2
IJSAM	(Makhdalena, Zulvina, & Zulvina, 2021)	0	81	2017-2019	3
IQTI	(Wulandari, Irfan, Zakaria, & Mujahidin, 2024)	0	34	2021	1
INTE	(Susanti dkk., 2018)	16	100	2018	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>4894</b>		
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>699</b>		<b>3</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 7 artikel dari 6 jurnal terakreditasi SINTA 3 yang membahas *anti-corruption disclosure*. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari ketujuh artikel tersebut yaitu 17 kali dengan rata-rata 2 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan bahwa artikel oleh Kurniawan (2017) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 10 sitasi. Artikel ini membahas pengungkapan informasi yang bersifat material pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya, jumlah sampel dari ketujuh artikel tersebut yaitu 2.055 observasi dengan rata-rata 294 observasi. Sampel terbanyak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023) dengan 1.739 observasi pada perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Kemudian, tahun pengamatan dari ketujuh artikel tersebut berkisar dari 1 hingga 3 tahun dengan rata-rata 2 tahun. Tahun pengamatan terlama, 3 tahun, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023) dan Kurniawan (2017).

**Tabel 2.** Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel SINTA 3

Jurnal	Artikel	Jumlah Sitasi	Jumlah Sampel	Tahun Pengamatan	
				Rentang	Jumlah
OWNER	(Permatasari & Prastiwi, 2023)	0	100	2020-2021	2
EJA	(Indarto, 2023)	2	1739	2019-2021	3
JRABA	(Kurniawan, 2017)	10	5	2014-2016	3
IMAR	(Permatasari dkk., 2020)	1	69	2017	1
JCA	(Hellenikapoulos & Utami, 2021)	0	34	2020	1
APFJ	(Utami, Pranata, & Alinsari, 2023)	0	107	2021	1
	(Saraswati, 2018)	4	1	2016	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>2055</b>		
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>294</b>		<b>2</b>

**Tabel 3.** Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel Jurnal Internasional

Jurnal	Artikel	Jumlah Sitasi	Jumlah Sampel	Tahun Pengamatan	
				Rentang	Jumlah
JCP	(Joseph dkk., 2016)	242	58	2013	1
	(Joseph dkk., 2019)	75	85	2016	1
JFC	(Faisal dkk., 2022)	27	243	2018	1
AJAR	(Ratu & Rahajeng, 2024)	0	450	2016-2018	3
REFF	(Zulvina & Adhariani, 2020b)	1	402	2016-2017	2
IJICC	(Zulvina & Adhariani, 2020a)	12	302	2016-2017	2
JTAIT	(Martani dkk., 2014)	19	434	2013	1
CG	(Utami & Barokah, 2024)	1	503	2015-2019	5
JBE	(Sari dkk., 2021)	90	117	2016	1
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>467</b>	<b>2594</b>		
<b>Rata-rata</b>		<b>52</b>	<b>288</b>		<b>2</b>

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 9 artikel dari 8 jurnal internasional yang membahas *anti-corruption disclosure* di Indonesia. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari kesembilan artikel tersebut yaitu 467 kali dengan rata-rata 52 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan bahwa artikel oleh Joseph dkk. (2016) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 242 sitasi. Artikel ini membahas perbandingan praktik *anti-corruption disclosure* antara sektor privat Indonesia dan Malaysia dengan indeks pengukuran. Selanjutnya, jumlah sampel dari kesembilan artikel

tersebut yaitu 2.594 observasi dengan rata-rata 288 observasi. Sampel terbanyak yaitu penelitian yang dilakukan oleh [Utami & Barokah \(2024\)](#) dengan 503 observasi pada perusahaan sektor konstruksi dari 7 negara Asia Pasifik tahun 2015-2019. Kemudian, tahun pengamatan dari ketujuh artikel tersebut berkisar dari 1 hingga 5 tahun dengan rata-rata 2 tahun. Tahun pengamatan terlama, 5 tahun, yaitu penelitian yang dilakukan oleh [Utami & Barokah \(2024\)](#).

**Tabel 4.** Klasifikasi Artikel berdasarkan Topik

Topik	SINTA 2		SINTA 3		INTERNASIONAL	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Anteseden	4	57%	2	29%	5	56%
Konsekuensi	1	14%	0	0%	1	11%
Anteseden dan Konsekuensi	0	0%	0	0%	1	11%
Lainnya	2	29%	5	71%	2	22%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

**Tabel 5.** Klasifikasi Variabel Anteseden dalam SINTA 2

Variabel Anteseden	Jumlah Artikel	%	Pengaruh		
			Positif	Negatif	Tidak
Kualitas Audit	2	10%	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> ); ( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )		
Tipe Industri	2	10%	( <a href="#">Tyas &amp; Rahmawati, 2023</a> )	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> )	
Diversifikasi	2	10%	( <a href="#">Hartomo &amp; Hutomo, 2020</a> )		( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> )
Kepemilikan Pemerintah	2	10%	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> ); ( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )		
Ukuran Perusahaan	2	10%	( <a href="#">Tyas &amp; Rahmawati, 2023</a> )		( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )
Keberadaan Komite Tata Kelola	1	5%	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> )		
Anggota Komisaris yang Berafiliasi Politik	1	5%	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> )		
Kepemilikan Manajerial	1	5%	( <a href="#">Hartomo &amp; Silvia, 2019</a> )		
Kepemilikan <i>Blockholder</i>	1	5%		( <a href="#">Hartomo &amp; Hutomo, 2020</a> )	
Ukuran Komisaris Independen	1	5%	( <a href="#">Hartomo &amp; Hutomo, 2020</a> )		
Ukuran Dewan Komisaris	1	5%	( <a href="#">Hartomo &amp; Hutomo, 2020</a> )		
Operasi Internasional	1	5%			( <a href="#">Tyas &amp; Rahmawati, 2023</a> )
Ukuran Dewan Direksi	1	5%	( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )		
Profitabilitas	1	5%		( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )	
Leverage	1	5%			( <a href="#">Makhdalena dkk., 2021</a> )
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>			

#### 4.1. Klasifikasi Berdasarkan Topik Pembahasan

[Tabel 4](#) menunjukkan bagaimana 23 artikel yang diamati terbagi menjadi beberapa topik. Artikel diklasifikasikan dalam 4 topik, yaitu anteseden, konsekuensi, anteseden dan konsekuensi, dan lainnya. Topik anteseden berarti meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *anti-corruption disclosure*. Topik konsekuensi berarti meneliti dampak dari *anti-corruption disclosure*. Topik anteseden dan konsekuensi berarti meneliti faktor dan dampak dari *anti-corruption disclosure*. Terakhir, topik lainnya meneliti *anti-corruption disclosure* selain dari 3 klasifikasi sebelumnya.

Topik yang mendominasi secara keseluruhan yaitu anteseden. Dengan total 11 artikel, terdapat 4 artikel SINTA 2, 2 artikel SINTA 3, dan paling banyak 5 artikel jurnal internasional meneliti topik ini. Artinya, sebagian besar artikel meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *anti-corruption*

*disclosure*. Hanya sedikit, yaitu masing-masing 1 artikel dari SINTA 2 dan jurnal internasional, yang meneliti topik konsekuensi. Paling sedikit yaitu hanya 1 artikel, di jurnal internasional, yang meneliti *anti-corruption disclosure* dalam topik anteseden sekaligus konsekuensi. Jumlah yang cukup besar, 9 artikel, justru berada dalam klasifikasi lainnya. Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 artikel SINTA 2, 2 artikel jurnal internasional, dan paling banyak 5 artikel SINTA 3.

Tabel 6. Klasifikasi Variabel Anteseden dalam SINTA 3

Variabel Anteseden	Jumlah Artikel	%	Pengaruh		
			Positif	Negatif	Tidak
Ukuran Perusahaan	1	11%	(Permatasari & Prastiwi, 2023)		
Umur Perusahaan	1	11%	(Permatasari & Prastiwi, 2023)		
Net Profit Margin	1	11%	(Permatasari & Prastiwi, 2023)		
Ukuran Dewan Komisaris	1	11%	(Permatasari & Prastiwi, 2023)		
Ukuran Dewan Direksi	1	11%	(Indarto, 2023)		
Ukuran Komisaris Independen	1	11%			(Indarto, 2023)
Frekuensi Rapat Komite Audit	1	11%			(Indarto, 2023)
Keberadaan Komite Tata Kelola	1	11%	(Indarto, 2023)		
Kualitas Audit	1	11%	(Indarto, 2023)		
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>			

Tabel 7. Klasifikasi Variabel Anteseden dalam Jurnal Internasional

Variabel Anteseden	Jumlah Artikel	%	Pengaruh		
			Positif	Negatif	Tidak
Kepemilikan Pemerintah	3	13%	(Utami & Barokah, 2024)	(Faisal dkk., 2022)	(Sari dkk., 2021)
Ukuran Perusahaan	2	9%	(Faisal dkk., 2022); (Zulvina & Adhariani, 2020b)		
Kepemilikan Asing	2	9%	(Sari dkk., 2021)		(Faisal dkk., 2022)
Tipe Industri	1	4%	(Faisal dkk., 2022)		
Profitabilitas	1	4%			(Zulvina & Adhariani, 2020b)
Leverage	1	4%			(Zulvina & Adhariani, 2020b)
Umur Perusahaan	1	4%			(Zulvina & Adhariani, 2020b)
Female CEOs	1	4%	(Zulvina & Adhariani, 2020a)		
Female CFOs	1	4%			(Zulvina & Adhariani, 2020a)
Level of Education	1	4%	(Martani dkk., 2014)		
Size of Municipality	1	4%	(Martani dkk., 2014)		
Budgetary Capacity	1	4%	(Martani dkk., 2014)		
Level of Independence	1	4%			(Martani dkk., 2014)
Kualitas Audit	1	4%	(Utami & Barokah, 2024)		
Country- professional accountant	1	4%	(Utami & Barokah, 2024)		
Uncertainty Avoidance	1	4%			(Utami & Barokah, 2024)
Government Dependence	1	4%	(Sari dkk., 2021)		
International Operations	1	4%			(Sari dkk., 2021)
UNGC Membership	1	4%			(Sari dkk., 2021)
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>			

#### 4.2. Klasifikasi Variabel Anteseden

Tabel 5 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 4 artikel penelitian terkait *anti-corruption disclosure* yang dipublikasikan pada jurnal SINTA 2. Secara keseluruhan, terdapat banyak, yaitu 15, variabel anteseden yang pernah diteliti. Variabel yang lebih sering digunakan dalam penelitian yaitu kualitas audit (10%), tipe industri (10%), diversifikasi (10%), kepemilikan pemerintah

(10%), dan ukuran perusahaan (10%). Selain dari yang telah disebutkan, seluruh variabel lain baru 1 kali diteliti (5%). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian pada variabel tipe industri, diversifikasi, dan ukuran perusahaan. Inkonsistensi hasil dari ketiga variabel tersebut dapat menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut atau mendalam. Dapat disimpulkan pula bahwa meski terbagi dalam variabel yang lebih sering dan lebih jarang diteliti, seluruh variabel dapat dikatakan masih jarang diteliti.

Tabel 6 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 2 artikel penelitian terkait *anti-corruption disclosure* yang dipublikasikan pada jurnal SINTA 3. Variasinya tidak sebanyak pada artikel SINTA 2, yaitu hanya 9 variabel. Itu mengingat bahwa baru ada 2 artikel yang meneliti topik anteseden *anti-corruption disclosure* di jurnal SINTA 3. Dari 9 variabel tersebut seluruhnya baru diteliti sebanyak 1 kali. Maka, tidak ada variabel tertentu yang dapat digolongkan sering diteliti. Kesembilan variabel tersebut masih tergolong jarang dan menarik untuk diteliti.

Tabel 7 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 5 artikel penelitian terkait *anti-corruption disclosure* yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Secara keseluruhan, terdapat banyak, yaitu 23, variabel anteseden yang pernah diteliti. Variabel yang paling sering digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan pemerintah (13%). Variabel lain yang menyusul yaitu ukuran perusahaan (9%) dan kepemilikan asing (9%). Selain dari yang telah disebutkan, seluruh variabel lain yang ditemukan, sejumlah 20, baru 1 kali diteliti (4%). Pada variabel kepemilikan pemerintah, terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang ada. Ketiga penelitian memiliki hasil yang berbeda: pengaruh positif, pengaruh negatif, dan tidak berpengaruh. Inkonsistensi juga ditemukan pada variabel kepemilikan asing, di mana penelitian oleh Sari dkk. (2021) menemukan hasil pengaruh negatif, sedangkan penelitian oleh Faisal dkk. (2022) menemukan hasil tidak terdapat pengaruh. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa masih banyak variabel yang jarang dan menarik untuk diteliti.

### 4.3. Klasifikasi Variabel Konsekuensi

Tabel 8 menunjukkan variabel konsekuensi yang diteliti dalam artikel jurnal SINTA 2 dan jurnal internasional. Terlihat bahwa jumlah penelitian pada konsekuensi *anti-corruption disclosure* jauh lebih sedikit dibandingkan penelitian pada anteseden. Artikel Khasanah & Kusuma (2020) pada jurnal SINTA 2 meneliti variabel earnings management, yang juga diteliti oleh Ratu & Rahajeng (2024) pada jurnal internasional. Satu variabel lainnya yaitu firm value, diteliti oleh Zulvina & Adhariani (2020a). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait konsekuensi dari *anti-corruption disclosure* masih sangat berpotensi untuk digali lebih banyak.

**Tabel 8.** Klasifikasi Variabel Konsekuensi dalam SINTA 2 dan Jurnal Internasional

Variabel Konsekuensi	Jumlah Artikel	%	Pengaruh		
			Positif	Negatif	Tidak
SINTA 2					
Earnings Management	1	100%		(Khasanah & Kusuma, 2020)	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>			
INTERNASIONAL					
Earnings Management	1	50%		(Ratu & Rahajeng, 2024)	
Firm Value	1	50%		(Zulvina & Adhariani, 2020a)	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>			

### 4.4. Klasifikasi Variabel Lainnya

Tabel 9 menunjukkan variabel lainnya yang diteliti dalam artikel di jurnal SINTA 2. Terdapat 1 artikel yang membahas pengukuran indeks *anti-corruption disclosure* dan 1 artikel lainnya melakukan tinjauan literatur terhadap praktik *anti-corruption disclosure*. Kedua artikel tersebut meneliti sampel yang berbeda, yaitu sektor publik yang dikhususkan pada PTKIN dan sektor swasta. Sejauh ini, hanya ada 1 penelitian tinjauan literatur terhadap *anti-corruption disclosure*. Penelitian ini cukup menarik, karena tinjauan dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan kasus-kasus yang pernah ada, secara mendalam terhadap perusahaan yang sempat terlibat kasus korupsi. Penelitian tinjauan literatur topik *anti-corruption disclosure* menjadi potensial untuk diteliti dalam fokus yang berbeda.

Tabel 10 menunjukkan variabel lainnya yang diteliti dalam artikel di jurnal SINTA 3. Peneliti menemukan 5 artikel yang sama-sama meneliti pengukuran indeks *anti-corruption disclosure* dalam sektor yang berbeda. Dari hasil penelitian kelima artikel tersebut, terlihat bahwa praktik *anti-corruption disclosure* di Indonesia masih dalam ingkatan yang beragam antarsektor, mulai dari yang rendah hingga tinggi. Dua artikel menjadikan perusahaan perbankan Indonesia sebagai sampel dengan fokus penelitian yang sedikit berbeda. Penelitian oleh Kurniawan (2017) berusaha melihat tingkat materialitas informasi *anti-corruption disclosure*. Sedangkan, penelitian oleh Utami dkk. (2023) berfokus pada tingkatan praktik pengungkapan yang diukur dengan indeks. Selain kedua artikel tersebut, 3 artikel lainnya memiliki sampel yang berbeda-beda.

Tabel 11 menunjukkan variabel lainnya yang digunakan dalam artikel di jurnal internasional. Kedua artikel bersifat komparasi yang membandingkan penerapan *anti-corruption disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan antara keduanya yaitu penelitian oleh Joseph dkk. (2016) menggunakan seluruh sektor perusahaan terbuka sebagai sampel, atau sektor privat. Sedangkan, penelitian oleh Joseph dkk. (2019) menggunakan situs pemerintah provinsi dan *City and Municipal Councils* sebagai sampel, atau sektor publik. Belum ada penelitian lain yang melakukan komparasi selain 2 artikel tersebut. Maka, penelitian komparatif ini masih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

**Tabel 9.** Klasifikasi Variabel Lainnya dalam SINTA 2

Variabel Lainnya	Artikel	Hasil
Pengukuran Indeks	(Wulandari dkk., 2024)	Anti-Corruption Disclosure di PTKIN dikatakan tinggi.
Tinjauan Literatur	(Susanti dkk., 2018)	Anti-Corruption Disclosure masih <i>voluntary</i> . Mayoritas perusahaan tidak melakukan upaya pelaporan. Upaya program antikorupsi korporasi di Indonesia pun tergolong rendah.
<b>Total</b>	<b>2</b>	

**Tabel 10.** Klasifikasi Variabel Lainnya dalam SINTA 3

Variabel Lainnya	Artikel	Hasil
Pengukuran Indeks	(Kurniawan, 2017)	Anti-Corruption Disclosure perbankan Indonesia menjadi urutan 6 dari 10 informasi yang bersifat material dalam laporan keberlanjutan.
	(Permatasari dkk., 2020)	Anti-Corruption Disclosure Indonesia-based Company tergolong rendah.
	(Hellenikapoulos & Utami, 2021)	Anti-Corruption Disclosure Pemerintah Provinsi Indonesia tergolong medium.
	(Utami dkk., 2023)	Anti-Corruption Disclosure perbankan Indonesia tergolong <i>high score</i> .
	(Saraswati, 2018)	Anti-Corruption Disclosure pada LIPI telah diterapkan.
<b>Total</b>	<b>5</b>	

**Tabel 11.** Klasifikasi Variabel Lainnya dalam Jurnal Internasional

Variabel Lainnya	Artikel	Hasil
Komparasi	(Joseph dkk., 2016)	Anti-Corruption Disclosure perusahaan Indonesia lebih tinggi dibanding perusahaan Malaysia.
	(Joseph dkk., 2019)	Anti-Corruption Disclosure Pemerintah Provinsi Indonesia lebih tinggi dibanding <i>City and Municipal Councils</i> Malaysia.
<b>Total</b>	<b>2</b>	

#### 4.5 Klasifikasi Populasi dan Metode Penelitian

Tabel 12 menunjukkan klasifikasi populasi yang diteliti dalam artikel-artikel terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Dalam pengklasifikasian antara sektor swasta dan sektor publik, penelitian didominasi oleh sektor swasta dengan total 18 artikel. Lima artikel lainnya menggunakan populasi sektor publik dalam penelitiannya. Dari artikel yang meneliti sektor swasta, populasi yang paling sering diteliti yaitu perusahaan terdaftar di BEI secara keseluruhan, dengan 5 artikel. Kemudian, disusul oleh perusahaan manufaktur, perusahaan nonkeuangan, perusahaan perbankan, dan perusahaan dengan tingkat korupsi tertinggi menurut OECD dengan masing-masing 2 artikel. Di sisi lain, artikel yang meneliti sektor publik paling banyak dilakukan dalam populasi pemerintah provinsi dengan 2 artikel.

**Tabel 12.** Klasifikasi Populasi

Populasi	SINTA 2	SINTA 3	INTER	Jumlah
Sektor Swasta				
Perusahaan Manufaktur	1	1		2
Perusahaan Terdaftar di BEI	2	1	2	5
Perusahaan Nonkeuangan	1		1	2
Perusahaan Pertambangan	1			1
Seluruh Perusahaan Sektor Swasta	1			1
Perusahaan Perbankan		2		2
Perusahaan Indonesia-based		1		1
Perusahaan dengan Tingkat Korupsi Tertinggi (OECD)			2	2
Perusahaan Konstruksi			1	1
Perusahaan dengan GRI sebagai <i>Benchmark</i>			1	1
<b>Total Sektor Swasta</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
Sektor Publik				
PTKIN	1			1
Pemerintah Provinsi		1	1	2
LIPI		1		1
Pemerintah Kota			1	1
<b>Total Sektor Publik</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

**Tabel 13.** Klasifikasi Metode Penelitian

	Kuantitatif		Kualitatif	
	Jumlah	%	Jumlah	%
SINTA 2	6	30%	1	33%
SINTA 3	5	25%	2	67%
INTERNASIONAL	9	45%	0	0%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

Tabel 13 menunjukkan klasifikasi metode penelitian yang digunakan pada artikel-artikel yang terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Sejumlah 20 penelitian atau sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif, dilakukan oleh 3 penelitian. Pada artikel terindeks SINTA 2, 6 artikel menggunakan metode kuantitatif dan 1 artikel menggunakan metode kualitatif. Artikel yang menerapkan metode kualitatif berupa pendekatan studi literatur dan analisa peraturan perundang-undangan oleh Susanti dkk. (2018). Pada artikel terindeks SINTA 3, 5 artikel menggunakan metode kuantitatif dan 2 artikel menggunakan metode kualitatif. Artikel yang menerapkan metode kualitatif berupa analisis deskriptif informasi pada laporan keberlanjutan oleh Kurniawan (2017) dan pendekatan studi literatur dan analisa peraturan perundang-undangan oleh Saraswati (2018). Pada artikel jurnal internasional, 9 artikel seluruhnya menggunakan metode kuantitatif dan tidak ada artikel yang menggunakan metode kualitatif.

#### 4.6 Peluang untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti menemukan bahwa penelitian yang membahas topik konsekuensi dari adanya *anti-corruption disclosure* masih sedikit, yaitu hanya 3 artikel sebagaimana dirincikan pada Tabel 8. Artikel Khasanah & Kusuma (2020) meneliti variabel *earnings management*, yang juga diteliti oleh Ratu & Rahajeng (2024). Satu variabel lainnya yaitu *firm value*, diteliti oleh Zulvina & Adhariani (2020a). Hal ini menjadi kesempatan untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel tersebut maupun memulai penelitian yang lebih beragam terkait topik konsekuensi. Beberapa contoh variabel konsekuensi yang dapat diteliti dapat mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas dampak dari pengungkapan CSR, sebagai topik general dari pengungkapan antikorupsi. Misalnya, variabel *cost of capital* yang masih relevan diteliti menurut studi bibliometrik pengungkapan CSR oleh Bosi, Lajuni, Wellfren, & Lim (2022). Sebab, terjadi inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terkait apakah pengungkapan CSR mempermudah manajemen mengelola *cost of capital* atau justru meningkatkan jumlahnya. Studi bibliometrik tersebut juga menyebut beberapa variabel lain yang berpotensi diteliti, seperti nilai perusahaan dan kinerja keuangan.

Telah dirincikan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 bahwa topik anteseden sudah cukup banyak dibahas dalam penelitian-penelitian yang ada. Namun, bukan berarti topik ini tidak menarik lagi untuk

diteliti, sebab jumlah penelitian per variabelnya masih di angka yang sedikit. Termasuk variabel yang paling sering diteliti, kepemilikan pemerintah, masih memiliki inkonsistensi hasil penelitian. Artikel [Hartomo & Silvia \(2019\)](#), [Makhdalena dkk. \(2021\)](#), dan [Utami & Barokah \(2024\)](#) menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap *anti-corruption disclosure*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian [Faisal dkk. \(2022\)](#) bahwa terdapat pengaruh negatif dan penelitian oleh [Sari dkk. \(2021\)](#) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan inkonsistensi tersebut, penelitian selanjutnya dapat meneliti lagi variabel kepemilikan pemerintah. Inkonsistensi juga terlihat pada penelitian terhadap variabel tipe industri, diversifikasi, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing. Selain variabel yang terdapat inkonsistensi, peluang penelitian juga ditunjukkan pada variabel yang jarang diteliti (sejauh ini hanya 1 kali) oleh penelitian sebelumnya. Variabel tersebut di antaranya ukuran komisaris yang berafiliasi politik ([Hartomo & Silvia, 2019](#)), kepemilikan manajerial ([Hartomo & Silvia, 2019](#)), keberagaman gender dewan direksi ([Zulvina & Adhariani, 2020a](#)), serta tingkat pendidikan dewan direksi dan dewan komisaris ([Martani dkk., 2014](#)).

Untuk variabel lainnya sebagaimana dirincikan pada [Tabel 9](#), [Tabel 10](#), dan [Tabel 11](#), penelitian berupa tinjauan literatur pernah dilakukan oleh [Susanti dkk. \(2018\)](#) yang menemukan bahwa upaya pelaporan antikorupsi korporasi di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian jenis ini dapat coba diterapkan pada sektor tertentu yang memiliki regulasi lebih ketat tentang korupsi. Yang kedua, penelitian pengukuran indeks pernah dilakukan pada *Indonesia-Based Company*, pemerintah provinsi, PTKIN, dan sektor perbankan. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian pada sektor lain seperti energi, industri, infrastruktur, atau bahkan membandingkan tingkat pengungkapan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal itu sejalan dengan bagaimana jenis penelitian yang ketiga, studi komparatif, masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seperti yang pernah dilakukan oleh [Joseph dkk. \(2016\)](#) dan [Joseph dkk. \(2019\)](#), praktik *anti-corruption disclosure* antara Indonesia dan Malaysia dibandingkan. Penelitian selanjutnya dapat mencoba membandingkan terhadap negara berkembang lainnya dengan karakteristik serupa. Secara keseluruhan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendorong tren dari penelitian topik *anti-corruption disclosure* agar lebih menjadi perhatian bagi entitas publik maupun privat di Indonesia.

## 5. Kesimpulan

Korupsi masih menjadi tantangan besar, kebijakan antikorupsi pun mulai diterapkan. Sebagai upaya mendukung regulasi yang ada dan proaktif dalam mencegah korupsi, entitas publik dan privat melakukan *anti-corruption disclosure*. Praktik dari *anti-corruption disclosure* mulai menarik perhatian peneliti, sehingga perlahan menunjukkan kenaikan tren sejak 2020. Penelitian topik ini di Indonesia paling awal yaitu tahun 2014, kemudian cukup stagnan hingga 2019. Secara lebih rinci, peneliti telah mengkaji penelitian *anti-corruption disclosure* di Indonesia melalui artikel pada jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Peneliti berhasil menemukan 23 artikel dalam periode 2014-2024 yang terbagi menjadi 7 artikel dari 7 jurnal terindeks SINTA 2, 7 artikel dari 6 jurnal terindeks SINTA 3, dan 9 artikel dari 8 jurnal internasional.

Berdasarkan topik penelitian, topik anteseden mendominasi dan disusul dengan topik lainnya yang sebagian besar berupa pengukuran indeks. Variabel yang sering diteliti yaitu anteseden berupa kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tipe industri. Masih banyak variabel yang jarang diteliti, seperti ukuran dewan komisaris yang berafiliasi politik, kepemilikan manajerial, keberagaman gender dewan direksi, serta tingkat pendidikan dewan direksi dan dewan komisaris. Variabel anteseden yang sering diteliti sekalipun masih memiliki inkonsistensi hasil penelitian, seperti pada kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan. Sedangkan, topik konsekuensi masih berjumlah sedikit, hanya 3 penelitian. Hal itu menjadikan variabel *firm value*, *earnings management*, dan *cost of capital* berpeluang untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, penelitian didominasi pada sektor swasta, terutama dengan sampel perusahaan terdaftar di BEI secara keseluruhan sektor. Untuk metode yang digunakan, sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Hanya ada tiga artikel dengan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur dan analisis deskriptif. Masih banyak peluang untuk penelitian selanjutnya, mengingat sedikitnya penelitian yang membahas *anti-corruption disclosure* di Indonesia sekaligus meningkatnya perhatian akan topik ini.

Misalnya, berfokus pada penelitian topik konsekuensi, maupun anteseden variabel kepemilikan pemerintah, tipe industri, diversifikasi, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing.

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan pencarian terutama di jurnal internasional. Database internasional yang diakses terbatas pada Scopus, SpringerNature, ScienceDirect, dan Emerald Publishing, sehingga mungkin melewatkan artikel lain di Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, prosiding konferensi, dsb. Penggunaan kata kunci pada *database* internasional pun terbatas pada “*anti-corruption disclosure Indonesia*” sehingga mungkin mengabaikan artikel dengan kata kunci sinonim seperti “*anti-bribery*”. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat lebih mendalami kata kunci serupa, menambah cakupan *database*, maupun mencoba aspek pemetaan penelitian yang lain misalnya penggunaan teori.

### Acknowledgment

Penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan dari Universitas Sebelas Maret, Hibah Kolaborasi Internasional dengan nomor kontrak 369/UN27.22/PT.01.03/2025

### Referensi

- ACCA. (2008). *Reporting Trilogy A Research on Reporting Disclosures Part 1: Anticorruption and Corruption Reporting Disclosures*. Diambil dari [https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/sustainability-reporting/ACC1528\\_BriberyReportMR.pdf](https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/sustainability-reporting/ACC1528_BriberyReportMR.pdf)
- Almaeda, T. R., Pramuda, A. V. D., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Penelitian Carbon Disclosure di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 109–133. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.17607>
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Penulis: Diky Anandya Kurnia Ramdhana*. Diambil dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan. *UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Pub. L. No. 28. (1999). Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (2001). Indonesia.
- Bosi, M. K., Lajuni, N., Wellfren, A. C., & Lim, T. S. (2022). Sustainability Reporting through Environmental, Social, and Governance: A Bibliometric Review. *Sustainability*, 14(19), 12071. <https://doi.org/10.3390/su141912071>
- European Commission. (t.t.). Corporate Sustainability Reporting. Diakses pada 21 Maret 2025, dari [https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting\\_en](https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en)
- Faisal, F., Joseph, C., Saputri, A., & Prastiwi, A. (2022). The Content and Determinants of CSR Anti-Corruption Disclosure: The Case of Public-Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 890–907. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0155>
- Hananti, N. P., Pratama, R. A., Rosian, T., & Sidabutar, A. (2023). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(5), 359–366.
- Hartomo, O. D., & Hutomo, S. H. P. (2020). The Ownership Structure, Board of Directors, Diversification, and Disclosure of Anti-Corruption Policies. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(2), 121–130. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.5660>
- Hartomo, O. D., & Silvia, B. M. (2019). Anteseden Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 196–9975. Diambil dari <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Hellenikapoulos, M., & Utami, I. (2021). How Strong is The Integrity Disclosure in Indonesian Province Website? *Journal of Contemporary Accounting*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss1.art4>

- Hesford, J. W., Lee, S.-H. (Sam), Van der Stede, W. A., & Young, S. M. (2006). *Management Accounting: A Bibliographic Study*. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01001-7](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01001-7)
- Indarto, S. L. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.581>
- Joseph, C., Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising Sustainable Development Goals via Online Integrity Framework Disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian Local Authorities. *Journal of Cleaner Production*, 215, 112–122. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057>
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A Comparative Study of Anti-Corruption Practice Disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) Best Practice Companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Khasanah, P. D. A., & Kusuma, I. W. (2020). Anti-Corruption Disclosure and Earnings Management: A Case in Indonesian Capital Market. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 101. <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.06>
- Krishnamurti, C., Shams, S., & Velayutham, E. (2018). Corporate Social Responsibility and Corruption Risk: A Global Perspective. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.02.002>
- Kurniawan, P. S. (2017). Pemodelan Peta Materialitas Informasi pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2(2), 202–223. Diambil dari [www.jraba.org](http://www.jraba.org)
- Makhdalena, M., Zulvina, D., & Zulvina, Y. (2021). Anti-Bribery Disclosure Trends among Mining Sector Stocks Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(2), 279. <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v5i2.346>
- Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T. (2014). Disclosure of Non-Financial Information about Public Services on The Official Website of Local Governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 20(2), 500–512. Diambil dari [www.jatit.org](http://www.jatit.org)
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 30–41.
- OECD. (t.t.). *Fighting Foreign Bribery*. Diakses pada 21 Maret 2025, dari <https://www.oecd.org/en/topics/fighting-foreign-bribery.html>
- Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.*, Pub. L. No. Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 (2015). Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas., Pub. L. No. UU No. 40 Tahun 2007, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965> (2007). Indonesia.
- Permatasari, P., Putra, F. W. I., & Natasha, V. (2020). Whether or Not Indonesia-Based Companies Consider Anti-Corruption Acts Important as Its Countrymen do. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(1), 35–48. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i1.7873>
- Permatasari, S. Y., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Anti Korupsi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 7(4), 3494–3509. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1638>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024). *Mengenal Indeks Persepsi Korupsi dan Langkah Menaikkan Skornya*. Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240813-mengenal-indeks-persepsi-korupsi-dan-langkah-menaikkan-skornya>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Ratu, D. M., & Rahajeng, D. K. (2024). Anti-Corruption Policy and Earnings Management: Do Women in Monitoring Roles Matter? *Asian Journal of Accounting Research*, 9(4), 340–357. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0327>

- Saraswati, D. (2018). Public Information Disclosure in Good Governance for The Prevention of Corruption in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.02.07>
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2021). Coercive Pressures and Anti-corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*, 171(3), 495–511. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04452-1>
- Susanti, D. S., Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 207.
- Transparency International. (t.t.). *What Is Corruption?*. Diakses pada 21 Maret 2025, dari <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Tyas, R.W. & Rahmawati, I. P. (2023). Pentingkah Karakteristik Perusahaan dan Tipe Industri pada Pengungkapan Anti Korupsi? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 291–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.14076>
- United Nations Global Compact. (2015). *A Practical Guide for Collective Actions Against Corruption*. Diambil dari <https://unglobalcompact.org/library/1781>
- Utami, E. R., & Barokah, Z. (2024). The Determinants of Corporate Anti-Corruption Disclosures: Evidence from Construction Companies in The Asia-Pacific. *Corporate Governance (Bingley)*, 24(6), 1414–1441. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2023-0152>
- Utami, I., Pranata, C. S., & Alinsari, N. (2023). Integrity Disclosure in Banking Companies in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 229–248. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.287>
- Wulandari, S., Irfan, A., Zakaria, N. B., & Mujahidin. (2024). Survey Study on Fraud Prevention Disclosure Measurement at State Islamic Universities in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 327–348. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2305>
- Zulvina, D., & Adhariani, D. (2020a). Anti-Corruption Disclosure and Firm Value: Can Female CEOs and CFOs Have Moderating Roles? *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net), 10(11), 771–794. Diambil dari [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Zulvina, D., & Adhariani, D. (2020b). Anti-Corruption Practice Disclosures: Evidence from Indonesia. Dalam Gitaharie. Beta Yulianita, Y. Abbas, M. K. Dewi, & D. Handayani (Ed.), *Research on Firm Financial Performance and Consumer Behavior* (hlm. 87–100). New York: Nova Science Publishers, Inc. Diambil dari <https://www.researchgate.net/publication/370810083>